

GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2008-2012

1. Kerangka Pemikiran Dasar

a. Gambaran Kondisi Sektor TIK Saat Ini

1) Kaltim Secara Umum

Sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menghadapi berbagai tantangan untuk dapat menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan disekitarnya dan tetap dapat bisa menyediakan pelayanan yang terbaik bagi publik. Penduduk Kaltim yang berjumlah 2,4 juta jiwa di tahun 2000, bertambah cukup signifikan menjadi 2,9 juta jiwa pada tahun 2006. Namun penyebaran penduduk tidak merata, lebih dari 50% penduduk tinggal di kawasan perkotaan, serta lebih 50% penduduk tinggal di Samarinda, Kutai Kartanegara dan Balikpapan. Hal ini menimbulkan banyak kesulitan dalam menjalankan pelayanan publik yang merata. Dibutuhkan suatu sistem komunikasi dan informasi yang betul-betul baik untuk dapat mengelola daerah ini. Padahal data sambungan telepon terpasang dari PT. Telkom di seluruh Kaltim pada tahun 2006 hanya berjumlah sekitar 22 ribu SST. Namun hal ini masih dapat dikompensasi oleh tingginya penetrasi penggunaan telepon seluler yang cukup tinggi.

Semua jaringan seluler GSM yang ada di Kaltim saat ini telah melayani Global Packet Radio System (GPRS), bahkan di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan telah tersedia layanan 3G dan 3,5G/HSDPA, namun masih terbatas di wilayah-wilayah tertentu dan belum mencakup keseluruhan kota (data tahun 2007). Untuk layanan seluler berbasis CDMA, hanya ada 2 operator yang

melayani sebagian besar kota dan ibukota kecamatan yang padat penduduk dengan teknologi CDMA 2000 1X.

Operator yang telah melayani wilayah Kaltim hingga tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (PSTN (lokal, long distance, international), CDMA, ADSL, VoIP, multimedia, layanan Internet)
2. PT. Telkomsel (GSM, GPRS, 3G, 3,5G/HSDPA, layanan Internet)
3. PT. Indosat Tbk (GSM, GPRS, 3G, 3,5G/HSDPA, CDMA, VoIP, multimedia, layanan Internet)
4. PT. Exelcomindo Pratama Tbk (GSM, GPRS, 3G, 3,5G/HSDPA, data, multimedia, layanan Internet)

Hingga tahun 2007, pengguna telepon seluler di Kaltim diperkirakan mencapai angka 2,5 juta nomor. Artinya Penetrasi telepon seluler sudah mencapai rasio 1:1 terhadap jumlah penduduk. Pengguna nasional sendiri diperkirakan mencapai 30 juta pengguna aktif serta 10 juta pengguna PSTN (tahun 2005). Namun belum semua kecamatan di perbatasan negara kita terlayani oleh telekomunikasi telepon.

Dari sisi perdagangan, nilai total ekspor Kaltim mencapai nilai USD 16,6 milyar pada tahun 2006, meningkat tajam dari USD 9,03 milyar pada tahun 2003. Sementara nilai impor mencapai USD 4,25 milyar, dari hanya USD 2,22 milyar tahun 2003. Hal ini menunjukkan betapa pesatnya pertumbuhan ekonomi di daerah ini.

Salah satu kendala utama bagi Kaltim dalam memajukan dunia industri adalah sangat terbatasnya kapasitas listrik tersedia. Data dari PT. PLN menyebutkan bahwa terdapat 1,5 juta MWh listrik yang diproduksi di Kaltim. Namun angka

tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat. Akibatnya, terutama di 2 kota besar Samarinda dan Balikpapan, terjadi pemadaman listrik secara berkala yang parah. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan sangat sulit bagi daerah ini untuk dapat memacu pertumbuhan ekonominya lebih cepat terutama dalam bidang industri TIK serta kebutuhan pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan TIK.

Dari segi ketatanegaraan, data terakhir pada tahun 2006, Kaltim yang memiliki luas 198.441 km² dibagi atas 13 Kabupaten/Kota yaitu Pasir, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Malinau, Bulungan, Nunukan, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan Bontang. Pada tahun 2007, ditambah lagi 1 kabupaten hasil pemekaran yaitu Tana Tidung. Pada tahun 2006, terdapat total 135 Kecamatan serta 1.404 Desa/Kelurahan. Dengan begitu banyaknya unit-unit penyelenggaraan pemerintahan yang tersebar di wilayah yang sangat luas serta sebagian besar masih sulit diakses, maka dibutuhkan suatu rancangan sistem komunikasi yang baik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di dunia saat ini sudah semakin maju. Dampak kemajuan itu terasa ke seluruh pelosok bumi, termasuk di Indonesia umumnya, serta Kaltim khususnya. Perkembangan teknologi ini juga menyentuh aspek pemerintahan baik untuk peningkatan kinerja internal organisasi, maupun dampaknya terhadap harapan peningkatan kualitas layanan publik.

Disisi lain, industri TIK juga merupakan salah satu sektor strategis bagi pembangunan nasional. Akan tetapi pertumbuhan industri TIK sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Infrastruktur telekomunikasi memegang peran utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga keamanan dan integritas dan untuk memfasilitasi pengembangan pendidikan,

kesehatan dan kegiatan pemerintahan secara keseluruhan. Berdasarkan studi ekstensif dari Roller dan Waverman, diketahui bahwa setelah mencapai tingkat teledensitas tertentu misalnya 40%, investasi dalam infrastruktur telekomunikasi akan mempunyai dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi per dollar investasi dibandingkan investasi infrastruktur lainnya. Penemuan ini juga berimplikasi pada kebijakan yang harus disiapkan oleh Pemprov Kaltim.

Di Indonesia, pertumbuhan sektor industri telekomunikasi saat ini lebih banyak didorong oleh industri telekomunikasi seluler yang menjadi motor utama pertumbuhan investasi dan pendapatan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India dan USA, selama ini pemerintah belum mampu melihat besarnya pasar domestik yang seharusnya bisa dijadikan kekuatan tawar dalam menentukan kebijakan dan aturan-aturan yang mendukung pengembangan pemanfaatan TIK di pemerintahan maupun di masyarakat. Liberalisasi dalam persaingan industri TIK membutuhkan kerangka hukum dan regulasi yang kuat serta kejelian dan "kecerdasan" pemerintah untuk mengikuti perkembangan dan jangan sampai mengorbankan keseimbangan kepentingan seluruh stakeholder yaitu kepentingan investor, operator, vendor, pemerintah dan yang terpenting kepentingan publik selaku pengguna akhir (end-user).

Selain dari hal-hal diatas, dalam jangka pendek, Pemprov Kaltim dihadapkan juga pada banyak agenda kegiatan skala nasional yang memerlukan kesiapan aspek TIK. Contohnya adalah agenda PON 2008 yang akan diselenggarakan di Provinsi Kaltim pada bulan Juni 2008. Kegiatan ini akan memerlukan usaha serius untuk meningkatkan kemampuan pelayanan publik Pemprov Kaltim melalui implementasi konsep-konsep pemanfaatan TIK yang betul-betul tertata rapi.

Dalam mewujudkan harapan implementasi e-government, diperlukan adanya dukungan data yang komprehensif meliputi hardware, software, infrastruktur jaringan, perangkat SDM. Data ini sangat diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan investasi jangka panjang yang tepat guna dan sesuai kebutuhan.

Layanan Internet telah melingkupi wilayah yang dapat dijangkau oleh telepon kabel. Layanan internet nir kabel (wireless) tersedia untuk wilayah-wilayah kota dan ibukota kabupaten. Pengguna Internet semakin meningkat, terutama di perkantoran (pemerintah maupun swasta), lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi), serta diikuti dengan meningkatnya jumlah warung internet (warnet). Perkembangan penggunaan Internet di masyarakat juga ditandai dengan semakin banyaknya blog (web log) yang ditulis oleh para penulis blog (blogger) dari seluruh penjuru Kaltim.

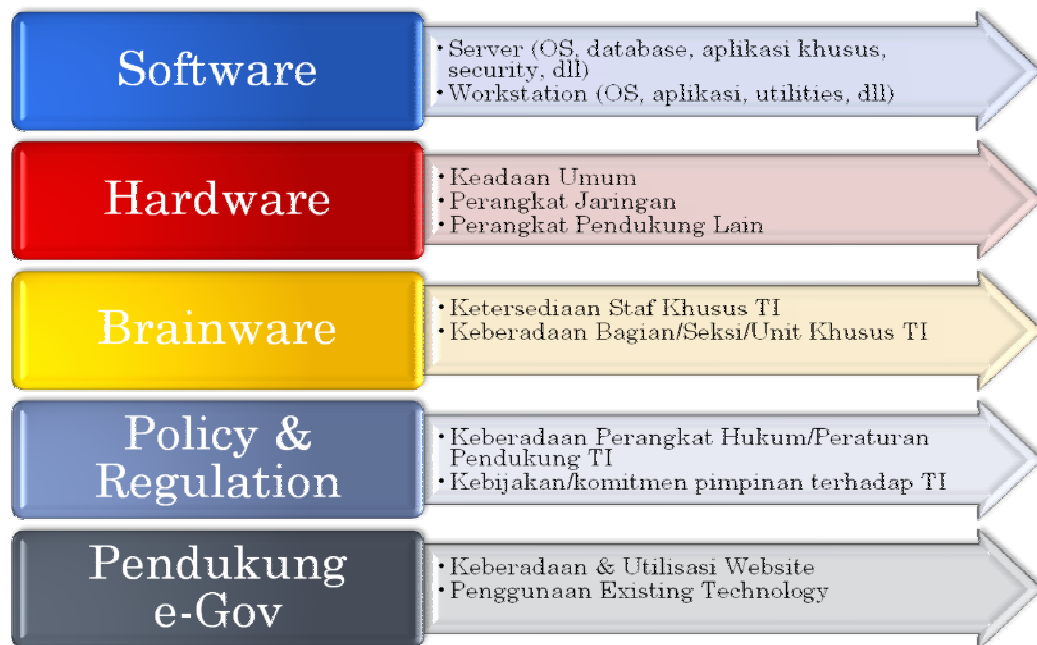
Industri pengembang perangkat lunak (software) sangat minim. Masih sedikit organisasi (pemerintah dan swasta) yang menggunakan sistem informasi yang dibuat secara profesional. Kalaupun ada, produk yang dihasilkan masih bersifat sederhana serta untuk penggunaan-penggunaan pada organisasi menengah kecil. Kebutuhan perangkat lunak yang lebih kompleks dan berskala besar dikerjakan oleh para vendor dari luar Kaltim, baik di dunia industri swasta maupun di instansi pemerintahan. Hal ini mengakibatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan informasi di Kaltim masih terbatas.

Ketersediaan informasi mengenai Kaltim sangat terbatas, terutama yang berbentuk digital. Namun beberapa kabupaten/kota telah membangun situs (website) serta sumber informasi digital lainnya.

2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

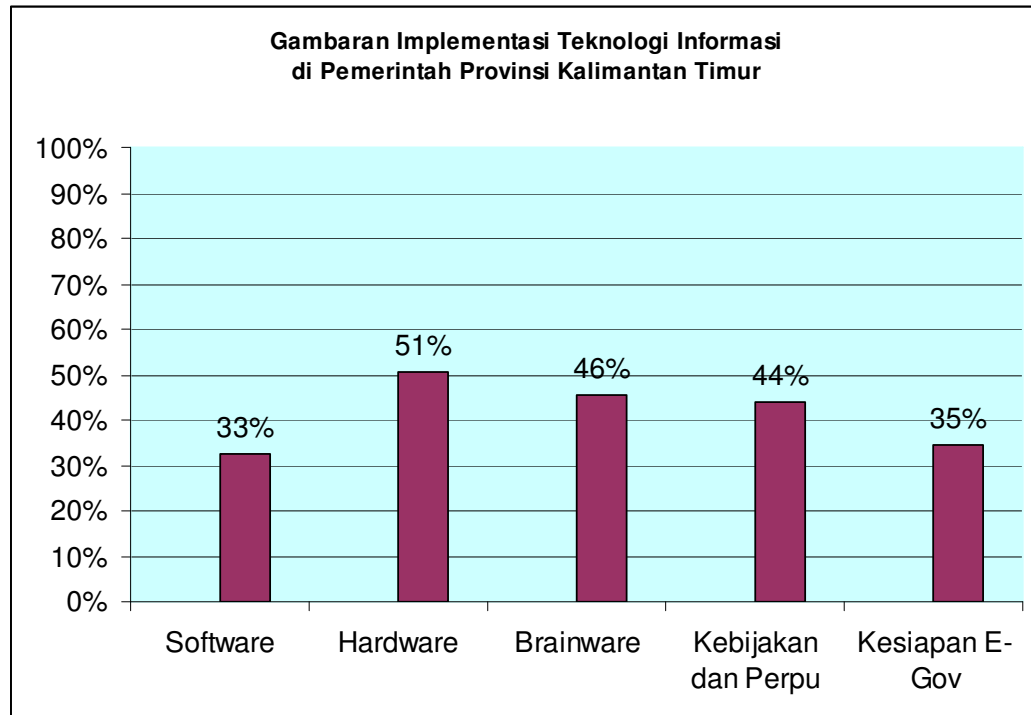
Dari hasil evaluasi yang dilakukan Tim Evaluasi Pengembangan Teknologi Informasi (TI) dan Penyusunan Grand Design Teknologi Informasi (TI) di Lingkungan Pemprov Kaltim pada tahun 2006, hasil dijabarkan dalam bagian ini.

Kriteria-kriteria yang dipakai dalam melakukan evaluasi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:



Implementasi Teknologi Informasi masih jauh dari cukup untuk mencapai e-Government yang dapat memuaskan kebutuhan pelayanan pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari belum terpenuhinya hardware, software, brainware dan kebijakan serta kesiapan e-Government.

Adanya ketidakseimbangan strategi pengembangan hardware, software, penyediaan sumber daya manusia dan kebijakan dan peraturan pendukung, sehingga pemanfaatan teknologi informasi secara keseluruhan tidak optimal di masing-masing dinas/instansi/biro.



Dinas/ Instansi	Software	Hardware	Brainware	Kebijakan dan Peraturan	Kesiapan e-Gov
Min	4%	0%	0%	0%	0%
Average	33%	51%	46%	44%	35%
Max	80%	90%	100%	67%	100%
Std. Deviasi	0.205	0.233	0.353	0.215	0.306

Berdasarkan rekapitulasi data keseluruhan Evaluasi Teknologi Informasi di Lingkungan Pemprov Kaltim maka diketahui bahwa masih ada beberapa badan/dinas/biro yang implementasi teknologinya masih kosong (0%) dalam beberapa aspek yaitu brainware, hardware, kebijakan dan peraturan dan Kesiapan e-government.

Selain itu diperoleh hasil yang sangat baik (80%-100%) pada beberapa badan/dinas/biro yaitu pada software, Hardware, Brainware dan Kesiapan e-Government, seperti pada Pusat Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUSDATINKOM) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kota Bontang. Tetapi untuk kebijakan dan peraturan yang mendukung

implementasi teknologi informasi, masih perlu perhatian lebih karena tidak ada data yang mencapai 70%.

Secara keseluruhan ketersediaan hardware di dinas/instansi/biro cukup baik. Terutama dalam aspek workstation serta hardware pendukung, namun untuk penyediaan server dan jaringan masih belum optimal. Ketersediaan SDM dan keberadaan bagian khusus yang menangani Teknologi Informasi di masing-masing dinas/instansi/biro masih sangat kurang. Sebagian besar dinas/instansi/biro tidak memiliki kebijakan dan peraturan yang berkenaan dengan penggunaan Teknologi Informasi serta untuk mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi yang lebih optimal di masa depan.

Pemprov Kaltim memiliki kapasitas bandwidth internet sebesar 4 MBps yang terdiri dari 2 MBps via fiber optik dan 2 MBps via VSAT. Seluruh instansi pemerintah, 2 (dua) lembaga (KAPET Sasamba dan KPU Kaltim), 2 (dua) perguruan tinggi (Unmul dan Akper), dan 5 (lima) sekolah telah terkoneksi jaringan internet yang ada.

Aplikasi yang telah dikembangkan adalah website, email, SIMPEDAL (Sistem Informasi Penanaman Modal), SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian), SISTRA (Sistem Informasi Strategis), SIPNAS (Sistem Informasi Pembangunan Nasional), Sistem Informasi Budgeting (e-procurement), SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah), Sistem Pelaporan dan Monitoring, dan beberapa sistem lainnya yang menunjang pemerintahan daerah.

Sumberdaya manusia yang mendukung pengelolaan TIK di instansi Pemprov Kaltim belum cukup optimal. Di setiap instansi pemerintah telah memiliki tenaga khusus untuk pengelolaan jaringan lokal di setiap instansi pemerintah, namun

masih belum memiliki kemampuan yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

Saat ini, ada banyak kendala yang menyebabkan Pemprov Kaltim melalui BPID untuk dapat secara maksimal mengelola jaringan yang telah dibangun. Dari hasil evaluasi, kendala-kendala tersebut terutama adalah:

- Keterbatasan jumlah staf pegawai yang memiliki kompetensi cukup baik dari level managerial maupun pada level teknis operasional.
- Pengamanan jaringan kurang maksimal, namun masih dapat dikembangkan.
- Belum tersedianya bandwidth manager untuk utilisasi Internet.
- Optimalisasi bandwidth WAN (via wireless) perlu dikembangkan dengan bandwidth optimizer.

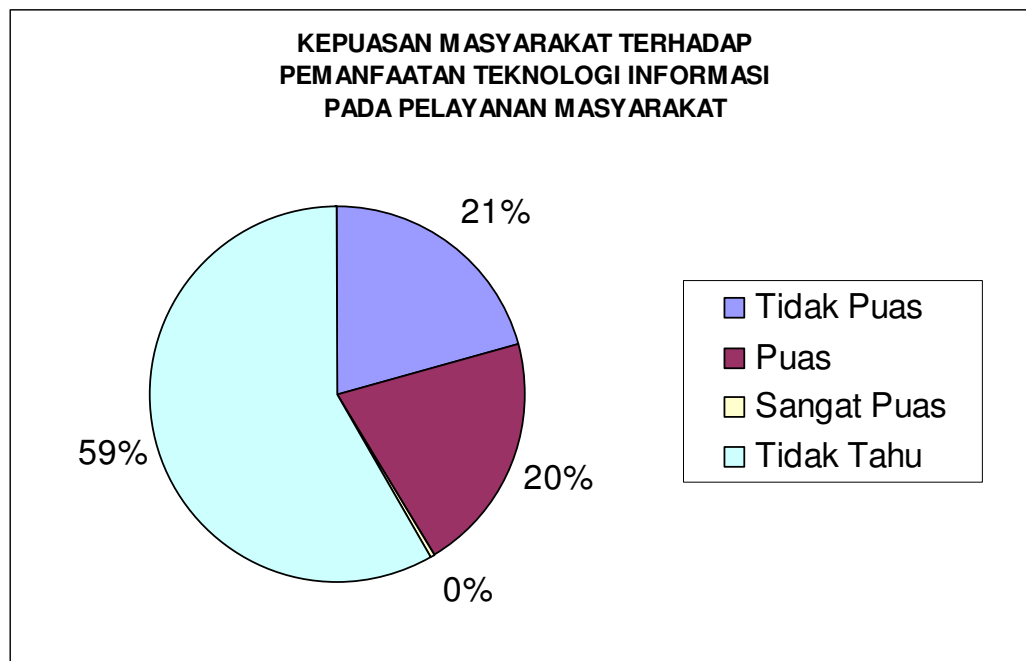
Untuk itu diperlukan strategi yang terpadu dan sinergi antar dinas/instansi/biro dalam pengembangan Teknologi Informasi terutama dalam aspek pengembangan hardware, software, SDM dan kebijakan dan peraturan. Semua aspek harus dijalankan secara seimbang dan saling mendukung.

Dari sisi kebijakan dan regulasi, Gubernur Kaltim telah mengeluarkan SK Gubernur No. 4 tahun 2004 tentang Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim, Bidang Produksi dan Pengolahan Teknologi Informasi pada tingkat eselon III di Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) Kaltim. Selain itu juga telah dikeluarkan SK Gubernur tentang Pembentukan Dewan Informasi Teknologi Provinsi Kaltim, SK Gubernur Kaltim No. 046/K.372/2006 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pengembangan Teknologi Informasi (TI) dan Penyusunan Grand Design Teknologi Informasi (TI) di Lingkungan Pemprov Kaltim dan SK Gubernur Kaltim No. 046/K.545/2007 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Grand Design

IT di Lingkungan Pemprov Kaltim. Namun belum ada regulasi setingkat Perda yang memayungi pengelolaan TIK di Provinsi Kaltim.

Kemudian, sebagian besar dinas/instansi/biro tidak memiliki kebijakan dan peraturan yang berkenaan dengan penggunaan Teknologi Informasi serta untuk mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi yang lebih optimal di masa depan. Sehingga diperlukan kebijakan khusus dari Pemprov Kaltim untuk membentuk bagian/seksi beserta SDM dengan sertifikasi khusus bidang Teknologi Informasi memiliki tugas pokok melakukan koordinasi pengembangan dan merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemprov Kaltim.

Dari hasil evaluasi ditemukan juga bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui mengenai pelayanan masyarakat di lingkungan Pemprov Kaltim yang menggunakan Teknologi Infomasi. Sehingga diperlukan usaha keras untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi berbasis Teknologi Infomasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.



Pada grafik terlihat kepuasan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi pada pelayanan masyarakat 20% responden menyatakan "puas" terhadap pelayanan yang diberikan. 21% responden menyatakan "tidak puas" dengan pelayanan yang diberikan. Dan 59% responden "tidak tahu" dengan pelayanan masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi.

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut diatas masih terdapat berbagai kendala dalam pengembangan TIK di Kaltim. Kendala tersebut diantaranya: (1) masih belum tersedianya energi listrik yang stabil; (2) kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pemeliharaan jaringan; (3) lokasi institusi Pemprov Kaltim yang berjauhan dan berada pada topografi yang berbukit menyebabkan terganggunya kualitas jaringan; (4) kesadaran pengelola terhadap kebutuhan TIK masih minim; (5) pengembangan aplikasi masih lemah; (6) masih minimnya jumlah dan kualitas SDM pengelola; (7) belum ada kepedulian dan pengetahuan tentang pentingnya TIK dari pengambil kebijakan.

b. Gambaran Masa Depan Dengan Adanya Perkembangan TIK

Komunikasi berbasis teknologi seluler diprediksi akan menjadi tulang punggung infrastruktur komunikasi di Kaltim pada masa depan. 3G dan 4G akan semakin berkembang dan komunikasi berbasis fixed line akan berkembang ke arah *fiber optic* atau teknologi *broadband* lainnya. Perkembangan konten lokal akan semakin meningkat sehingga lalu lintas data lokal akan semakin padat.

Komunikasi berbasis protokol internet akan semakin meningkat seperti IP-TV, IP-Phone/VoIP, *Video On Demand (VoD)*, *Teleconference* dan lain-lainnya. Pertumbuhan pengguna akan berkembang tidak hanya pada perkantoran dan industri, tetapi akan meluas pada pengguna individual.

Seiring dengan perkembangan teknologi di atas maka kebutuhan akan perangkat lunak dan sistem informasi akan semakin tinggi, hal ini akan mendorong tumbuhnya industri pengembang perangkat lunak lokal. Sehingga kebutuhan akan SDM TIK akan meningkat pula. Kondisi ini akan menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan informasi di Kaltim, hal ini akan ditandai dengan semakin banyaknya informasi berbentuk digital yang tersedia dan dapat di akses secara terbuka oleh publik.

1) Perekonomian

Berlangsungnya era pasar global menjadikan persaingan semakin menguat antar pelaku usaha. Perkembangan TIK mendorong pergerakan ekonomi semakin cepat. Batas negara tak lagi menjadi sekat dalam roda perekonomian. Transaksi ekonomi pun dilakukan tanpa melalui proses pertemuan langsung. Transaksi elektronik akan semakin kerap terjadi dengan wilayah lain di Indonesia maupun dengan pelaku usaha di negara berbeda.

Aliran informasi yang dapat diakses dengan cepat telah menjadi kebutuhan yang mengiringi kecepatan gerak ekonomi global. Kebutuhan akan informasi aktual perdagangan semakin meningkat. Persaingan global di pasar bebas menuntut adanya peningkatan kapasitas pelaku ekonomi.

Faisal Basri dalam kata pengantar buku "The World is Flat" yang ditulis Thomas L. Friedman (2006) mengungkapkan konsekuensi logis dari dunia yang kian datar adalah harga-harga barang cenderung akan sama di seantero dunia. Sebuah negara tak bisa lagi mengandalkan daya saingnya dari keberlimpahan sumberdaya alam. Pasar domestik tak lagi terisolasi, melainkan terintegrasi dengan pasar regional dan pasar dunia.

Industri yang berdaya saing dan mampu bertahan adalah industri yang menggunakan sistem informasi dan komunikasi yang aplikatif dan efisien dengan tenaga kerja yang kreatif dan inovatif. Persaingan harga yang kian kompetitif akan tersaji dalam setiap ruang kehidupan.

Perekonomian rakyat akan semakin meningkat bila prasyarat kemampuan penguasaan terhadap TIK terpenuhi. Pertumbuhan kelompok ekonomi rakyat akan bersaing dengan kelompok industri, yang bila tidak ada sebuah pengaturan yang adil diantaranya akan menjadi sebuah persaingan yang sangat tidak sehat dan mematikan kelompok ekonomi rakyat.

2) Pemerintahan

Keterbukaan informasi sebagai sebuah dampak dari perkembangan TIK menjadikan perubahan bentuk layanan yang diberikan pemerintah kepada publik. Pemerintah akan menjadi lembaga layanan bagi berbagai kepentingan publik yang profesional, cepat-tanggap dan transparan-akuntabel. Pemenuhan layanan publik pun dapat dilakukan dengan tanpa mengunjungi kantor pemerintahan, semisal melalui website dan email ataupun pesan singkat (SMS).

Kebutuhan layanan publik kepada pemerintah bergerak pada layanan administratif yang terpadu dalam sebuah sistem. Kebutuhan publik lainnya akan diperoleh publik tanpa melalui pemerintah. Pemerintah harus sudah menyediakan perangkat aturan yang mudah dan memudahkan bagi kebutuhan aktivitas publik, termasuk terhadap dunia usaha.

Kebutuhan jumlah aparat pemerintah semakin mengecil dengan penggunaan TIK. Hanya pada bidang strategis saja, semisal pertahanan-keamanan, pendidikan dan kesehatan, tetap akan dibutuhkan jumlah yang proporsional dengan kewilayahan.

3) Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan akan semakin berkurang peran pemberian informasi/ pengetahuan. Lembaga pendidikan dasar menjadi sebuah lembaga pencerdasan yang meletakkan dasar berpikir dan membangun sistematika berpikir cepat, efektif, responsif dan komprehensif. Di sisi lain, lembaga pendidikan lanjutan harus menyediakan pendidikan keahlian khusus sebagai sebuah kebutuhan utama bagi publik.

Media pembelajaran juga akan bergerak pada sebuah media pembelajaran yang aplikatif dan interaktif. Peran pengajar tidak lagi sebagai penyedia informasi, namun menjadi jembatan informasi. Metodologi pembelajaran akan terus berkembang dengan ketersediaan TIK.

Lembaga kajian (riset) dibutuhkan dalam aspek pengembangan cepat sebuah pengetahuan. Pengetahuan-pengetahuan dasar yang telah dimiliki akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna (user). Lembaga kajian (riset) yang berkuat dalam ruang sempit tidak akan mampu bertahan, sementara yang akan

semakin menguat adalah lembaga kajian (riset) yang memuaskan kebutuhan publik.

4) Masyarakat

Masyarakat (publik) akan tumbuh menjadi masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) dan pengguna layanan elektronik. Komunitas-komunitas akan berkembang dalam sebuah lingkaran-lingkaran yang saling beririsan inter dan antar komunitas.

Ikatan sosial publik terbangun dalam sebuah jejaring tanpa batas negara. Bila tidak diikuti dengan penguatan ikatan sosial di ranah kehidupan, maka dapat terjadi de-humanisasi di lingkungan interaksi langsung publik. Solidaritas dapat terjadi tidak lagi dalam sebuah batasan administrasi kewilayahan maupun batasan negara. Kesatuan masyarakat internasional akan terbangun.

Publik akan tumbuh sebagai kelompok kritis dengan aliran informasi yang semakin mudah diakses. Kontrol publik terhadap pemerintah akan semakin menguat. Selain itu, publik juga akan membangun sebuah komunitas belajar antar publik secara langsung, dengan peran pemerintah yang semakin mengecil bahkan menjadi tiada.

c. Isu-Isu Sentral (*Problem*)

1. Regulasi

Eksistensi teknologi informasi disamping menjanjikan sejumlah harapan, pada saat yang sama juga melahirkan kecemasan-kecemasan baru antara lain munculnya kejahatan baru yang lebih canggih dalam bentuk cyber crime. Disamping itu, mengingat teknologi informasi yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan sepenuhnya beroperasi secara maya (virtual), teknologi informasi juga melahirkan aktivitas-aktivitas baru yang harus diatur oleh hukum yang

berlaku saat ini. Kenyataan ini harus dibuatkan regulasi yang mengatur mengenai aktivitas-aktivitas yang melibatkan teknologi informasi.

Pemanfaatan Teknologi informasi dalam kegiatan di masyarakat, pemerintahan maupun kegiatan ekonomi perlu didukung oleh aturan perundangan. Pemakaian perangkat lunak yang legal, pelayanan berbasis elektronik (e-services), penggunaan nomer identitas tunggal bagi setiap penduduk, lelang berbasis elektronik (e-procurement), anggaran berbasis elektronik (e-budget) merupakan contoh pemanfaatan teknologi yang perlu diatur dalam suatu regulasi.

Regulasi diperlukan untuk memberi dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dengan menekan akibat-akibat negatifnya serendah mungkin.

Belum lengkapnya perangkat peraturan/perundangan baik akan membuka dampak terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi dan terhambatnya pengembangan teknologi informasi itu sendiri.

2. Infrastruktur

Terbatasnya infrastruktur menyebabkan rendah dan tidak meratanya penetrasi penggunaan internet dan kepemilikan komputer di masyarakat yang disebabkan tidak tersedia dan mahalnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Rencana proyek Palapa-Ring yang akan menghubungkan 440 wilayah di Indonesia serta pengadaan komputer murah perlu mendapat dukungan di Kaltim. Di Kaltim infrastruktur Teknologi informasi harus dapat secara cepat dan bertahap mencapai seluruh penjuru wilayah Kaltim.

Dengan tersedianya infrastruktur di seluruh wilayah Kaltim diharapkan dapat menekan harga dan tersebarnya pemanfaatan teknologi informasi bagi masyarakat.

3. Sumberdaya Manusia

Tantangan utama dari pengembangan TIK adalah kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelakunya bukan sekedar teknologinya. Kunci sukses dari implementasi TIK sangat tergantung dari kepemimpinan, kesiapan infrastruktur, kesinambungan informasi, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan dukungan masyarakat.

Pemimpin pemerintahan perlu menyadari bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TIK sangatlah penting dan menuntut perubahan paradigma, dari *government centric* menuju *customer centric*, sehingga layanan-layanan yang diberikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, jika pemimpin pemerintahan memahami pentingnya teknologi informasi, maka lebih dapat dipastikan implementasi pemanfaatan TIK dapat berjalan dengan baik.

Pengembangan SDM TIK merupakan upaya peningkatan kapasitas personil, baik untuk lingkungan pemerintahan dalam rangka meningkatkan good governance maupun di lingkungan industri dalam memacu perkembangan industri, baik industri TIK itu sendiri maupun TIK sebagai pendukung industri/bisnis dan aktivitas lainnya.

Pengembangan SDM TIK tidak hanya tertuju pada pengembang dan pengelola informasi dalam berbagai kepentingan baik komersial maupun non komersial, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pengguna. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa upaya mendorong keahlian dalam pengembangan jaringan, sarana, aplikasi dan informasi kurang bermakna apabila tidak diakses oleh masyarakat Kaltim yang kondisi umumnya pada tingkat kesadaran, pengetahuan dan keterampilan (skill) di bidang ini masih rendah.

Lemahnya SDM salah satunya disebabkan oleh terbatasnya institusi pendidikan-pelatihan serta cepatnya perkembangan TIK. Keluaran institusi juga tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Selain itu, tidak terpenuhinya kompetensi para pengguna TIK baik di masyarakat, perusahaan dan pemerintahan menyebabkan beban terhadap efisiensi dan efektifitas pemanfaatan TIK.

4. Kelembagaan

Perkembangan TIK yang begitu cepat baik secara hardware maupun software menyebabkan tuntutan yang semakin tinggi akan penggunaan dan pemanfaatan TIK khususnya di lingkungan Pemprov Kaltim. Hampir tidak ada kegiatan baik administratif maupun operasional, terutama untuk pelayanan publik dilakukan dengan bantuan TIK.

Dari hanya pengaksesan data secara stand alone, saat ini telah berkembang ke menjadi jaringan LAN dedicated hingga Nirkabel dan kebutuhan akan akses internet menjadi wajib di lingkungan Pemprov Kaltim. Untuk itu diperlukan suatu institusi yang secara khusus menangani dan mengembangkan TIK khususnya untuk di lingkungan Pemprov Kaltim.

Sampai saat ini Institusi yang khusus mengelola TIK di lingkup Pemprov Kaltim terdapat pada saat ini pada level eselon III (Bidang). Kapasitas bidang pengelola TIK masih sangat kecil sehingga belum mampu mengembangkan TIK secara menyeluruh. Keterlibatan SKPD dalam mengelola TIK juga masih sangat rendah, dan hanya sebatas penyediaan perangkat keras dan belum menyentuh pembangunan sistem yang lebih terpadu. Di tingkat pimpinan, pengelolaan TIK masih pada tingkat wacana dan belum menjadi sebuah kebijakan di masing-masing instansi.

Saat ini pemerintah pusat telah membentuk kementerian komunikasi dan informasi (Kominfo) yang menjadi institusi khusus menangani TIK di tingkat nasional. Khusus untuk Pemprov Kaltim informasi yang berkembang pada tahun 2008 akan dibentuk kantor setingkat dinas yang khusus menangani TIK. Dengan adanya lembaga khusus ini yang menangani TIK ini diharapkan Pengelolaan TIK lebih terpadu dan pengembangan lebih terarah. Dengan kapasitas pengelolaan yang luas dan meningkatkan visi TIK di lingkungan pimpinan badan dan dinas di lingkungan Pemprov Kaltim.

5. Industri

Pemanfaatan TIK di lingkungan Masyarakat Kaltim saat ini sudah sangat berkembang sekali ditandai dengan penggunaan seluler yang sampai saat ini telah mencapai perbandingan 1 : 1.

Seiring dengan perkembangan penggunaan TIK di masyarakat, berkembang pula industri TIK baik dari segi jasa maupun penyedia hardware dan software untuk memenuhi kebutuhan baik industri, pemerintahan maupun kebutuhan individu-individu .

Sebagai bagian dari perkembangan TIK di Kaltim, industri TIK yang saat ini berkembang tidak terlalu optimal, hal ini disebabkan karena pasar sendiri yang belum berkembang. Banyak pengguna masih mengandalkan produk TIK dari luar Kaltim sendiri seperti software-software aplikasi dan pembajakan terhadap produk-produk software yang sangat mudah dilakukan. Hal ini dipengaruhi oleh paradigma masyarakat yang belum menghargai informasi dan hak cipta sebagai modal utama dalam persaingan global.

Sumber daya manusia TIK di Kaltim saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan ditandai banyaknya sekolah menengah kejuruan bidang TIK

dan perguruan tinggi di bidang TIK. Dimana ini akan menjadi modal awal untuk berkembangnya Industri TIK di Kaltim. Dan saat ini cukup banyak kelompok komunitas TIK berkembang di Kaltim sebagai bagian dari perkembangan industri TIK di Kaltim

Apabila semua modal dasar perkembangan industri TIK ini tidak di barengi dengan perubahan paradigma dimasyarakat untk menghargai informasi dan hak cipta, maka akan sangat menghambat masyarakat dan pemerintah Kaltim sendiri dalam menghadapi persaingan global

6. Konten

Penggunaan dan pemanfaatan source data secara bersama-sama menjadi sangat penting dalam penyelesaian semua unit kerja maupun badan dinas di lingkungan Pemprov Kaltim. Tetapi tidak semua unit kerja dan badan dinas memiliki kemampuan untk mengakses data bersama-sama (sharing).

Kendala utama data tidak dapat diakses secara bersama-sama di antaranya adalah sistem yang digunakan tidak terhubung ke jaringan atau tidak tersedia akses ke jaringan yang dapat dilakukan bersama-sama. Selain itu format data yang digunakan mengkin tidak sama, sehingga karena ketersediaan tenaga SDM yang mampu menangani data dengan format yang berbeda ini masih kurang maka menjadi kendala untuk berbagi sumber.

Dalam berbagai sistem informasi yang tersedia, khususnya layanan publik diperlukan standarisasi baku interoperabilitas data dan konten. Karena hal ini sangat mempengaruhi konten lokal dan komunikasi antar sistem informasi. Yang tersedia di lingkungan Pemprov Kaltim.

d. Ruang Lingkup

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK adalah Pengolahan dan distribusi data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, telekomunikasi dan peralatan elektronika digital. (*Encyclopedia Encarta*)
2. Grand Design TIK adalah rencana makro berjangka lima tahun yang berisi tentang arah, kebijakan dan strategi pengelolaan TIK dan penerapannya dalam wilayah Provinsi Kaltim dengan tetap memperhatikan rencana pembangunan.
3. Pemprov Kaltim adalah gubernur dan perangkat daerah provinsi Kaltim lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. (Bank Dunia). Prinsip-prinsip *Good Governance* meliputi (Masyarakat Transparansi Indonesia):
 - 1) Partisipasi Masyarakat;
 - 2) Tegaknya Supremasi Hukum;
 - 3) Transparansi;
 - 4) Peduli pada Stakeholder;
 - 5) Berorientasi pada Konsensus;
 - 6) Kesetaraan;
 - 7) Efektifitas dan Efisiensi;
 - 8) Akuntabilitas, dan;
 - 9) Visi Strategis.

e. SWOT Analysis

Analisa SWOT ini dilakukan sesuai dengan ruang lingkup di atas.

1) Kekuatan

- a) Tersedianya sumberdaya yang cukup memadai
- b) Infrastruktur komunikasi yang cukup memadai
- c) Ketersediaan perangkat keras telah memadai
- d) Akses internet telah tersedia di seluruh wilayah
- e) Keinginan yang kuat Pemprov Kaltim untuk mengembangkan TIK
- f) Telah ada organisasi khusus setingkat bidang (eselon III) yang melakukan pengelolaan TIK di Pemprov Kaltim

2) Kelemahan

- a) Kuantitas dan kualitas SDM pengelola TIK yang rendah
- b) Kondisi topografi yang berbukit
- c) Komitmen pemerintah belum cukup kuat
- d) Energi listrik yang tidak stabil dan tidak memadai
- e) Perangkat lunak masih belum cukup tersedia
- f) Belum ada regulasi yang mendukung perkembangan TIK di Kaltim
- g) Data dan informasi belum terpadu
- h) Kualitas pelayanan masyarakat masih rendah dan belum memanfaatkan TIK secara optimal
- i) Belum adanya standar prosedur operasional pengelolaan TIK
- j) Belum adanya organisasi khusus yang melakukan pengelolaan TIK di tingkat SKPD
- k) Belum meratanya akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat Kaltim

3) Peluang

- a) Semakin turunnya harga Teknologi Informasi dan Komunikasi
- b) Diversitas masyarakat tinggi
- c) Lembaga pendidikan TIK yang tumbuh berkembang

- d) Masih banyaknya potensi dasar Kaltim yang belum terpromosikan ke dunia internasional
- e) Masih banyaknya informasi pengetahuan dan teknologi terbaru di luar Kaltim yang belum dapat diakses oleh masyarakat Kaltim
- f) Semakin banyak investor yang memanfaatkan TIK dalam pengambilan keputusan investasi
- g) Otonomi daerah memberikan kesempatan untuk mengembangkan peraturan berkaitan TIK pada tingkat Pemprov

4) Ancaman

- a) Kepedulian masyarakat rendah terhadap kinerja Pemprov Kaltim
- b) Batas akhir penerapan e-Government di tahun 2010
- c) Semakin tingginya persaingan digital di tingkat global
- d) Tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, tepat dan terpadu

Tabel 1. Matrik Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p> <p style="text-align: center;">INTERNAL</p>	<p>Peluang (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin turunnya harga Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Diversitas masyarakat tinggi 3. Lembaga pendidikan TIK yang tumbuh berkembang 4. Masih banyaknya potensi dasar Kaltim yang belum terpromosikan ke dunia internasional 5. Masih banyaknya informasi pengetahuan dan teknologi terbaru di luar Kaltim yang belum dapat diakses oleh masyarakat Kaltim 6. Semakin banyak investor yang memanfaatkan TIK dalam pengambilan keputusan investasi 7. Otonomi daerah memberikan kesempatan untuk mengembangkan peraturan berkaitan TIK pada tingkat Pemprov 	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepedulian masyarakat rendah terhadap kinerja Pemprov Kaltim 2. Batas akhir penerapan e-Government di tahun 2010 3. Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi 4. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, tepat dan terpadu
<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumberdaya yang cukup memadai 2. Infrastruktur komunikasi yang cukup memadai 3. Ketersediaan perangkat keras telah memadai 4. Akses internet telah tersedia di seluruh wilayah 5. Keinginan yang kuat Pemprov Kaltim untuk mengembangkan TIK 6. Telah ada organisasi khusus setingkat bidang (eselon III) yang melakukan pengelolaan TIK di Pemprov Kaltim <p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas dan kualitas SDM pengelola TIK yang rendah 2. Kondisi topografi yang berbukit 3. Komitmen pemerintah belum cukup kuat 4. Energi listrik yang tidak stabil dan tidak memadai 5. Perangkat lunak masih belum cukup tersedia 6. Belum ada regulasi yang mendukung perkembangan TIK di Kaltim 7. Data dan informasi belum terpadu 8. Kualitas pelayanan masyarakat masih rendah dan belum memanfaatkan TIK secara optimal 9. Belum adanya SOP pengelolaan TIK 10. Belum adanya organisasi khusus yang melakukan pengelolaan TIK di tingkat SKPD 11. Belum meratanya akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat Kaltim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan TIK 2. Mengembangkan organisasi dan tata kerja pemerintah yang partisipatif, efisien dan efektif dengan pemanfaatan TIK 3. Meningkatkan penyediaan dan mengembangkan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data bagi masyarakat secara luas 4. Mendorong perkembangan pendidikan TIK 5. Mendorong peningkatan akses internet bagi masyarakat 6. Menyediakan informasi sebanyak-banyaknya akan potensi dasar Kaltim <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kapasitas SDM pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK 2. Mempercepat pembangunan sumber-sumber penyedia energi listrik untuk publik 3. Meningkatkan penyediaan dan mengembangkan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data bagi masyarakat secara luas 4. Menyediakan perangkat lunak legal 5. Menata dan mengelola data dan informasi menjadi terpadu 6. Mengembangkan regulasi dan SOP yang mendukung terlaksananya TIK 7. Menata keorganisasian pengelolaan TIK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan dasar berupa infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data bagi masyarakat secara merata dan proporsional 2. Mengembangkan dan menyediakan layanan akses informasi untuk menciptakan masyarakat berdaya saing global 3. Mendorong percepatan pembangunan e-Government <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan perangkat-perangkat lunak yang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik lokal 2. Menghindari kelemahan sistem pengembangan perangkat lunak dan keras serta pengelolaan data yang belum terintegrasi dan handal untuk mengurangi ketidakpuasan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif

2. Cetak Biru

a. Visi

1) Pemerintah Provinsi Kaltim

"Terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera dalam pembangunan berkelanjutan"

2) Pemerintah Provinsi Kaltim dalam Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

"Terwujudnya *good governance* dan masyarakat berdaya saing global melalui pemanfaatan TIK yang handal"

b. Misi

1. Membuat kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan TIK
2. Mengembangkan organisasi dan tata kerja pemerintah yang partisipatif, efisien dan efektif dengan pemanfaatan TIK
3. Mengembangkan kapasitas SDM pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK
4. Meningkatkan pelayanan dasar berupa infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data bagi masyarakat secara merata dan proporsional
5. Mengembangkan perangkat-perangkat lunak yang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik lokal
6. Mengembangkan dan menyediakan layanan akses informasi untuk menciptakan masyarakat berdaya saing global

c. Kebijakan dan Strategi

1. Membuat kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan TIK

Kebijakan 1.1

Pengembangan regulasi dan kebijakan di bidang pengelolaan TIK

Strategi:

- Pembuatan regulasi pengembangan e-government
Program yang dilakukan meliputi penyusunan peraturan administrasi pemerintah digital (digital office administration), peraturan e-government, peraturan penggunaan perangkat lunak legal, peraturan kerangka penyiapan SDM bidang TIK, peraturan pelaksanaan kebijakan TIK nasional dan peraturan penunjukan pusat riset TIK di Kaltim.
- Pengembangan kriteria dan indikator keberhasilan pengelolaan TIK
Program yang dilakukan meliputi penyusunan kriteria dan indikator keberhasilan administrasi pemerintah digital (digital office administration), dan e-government.
- Pembuatan Standar Prosedur Operasional untuk pengelolaan TIK
Program yang dilakukan meliputi pengembangan prosedur pengelolaan sistem komunikasi dan informasi yang transparan dan akuntabel, standar prosedur operasional administrasi pemerintah digital (digital office administration), e-government, penggunaan perangkat lunak legal, jabatan fungsional pranata komputer, dan keamanan data digital pemerintah

Kebijakan 1.2

Pengembangan regulasi dan kebijakan di bidang pemanfaatan TIK

Strategi:

- Pengembangan kebijakan pendidikan yang mendukung pemanfaatan TIK
Program yang dilakukan meliputi penyusunan standar kompetensi dan sertifikasi tenaga TIK, dan peraturan pengembangan pendidikan berbasis TIK.
- Pengembangan kebijakan yang menjamin adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat menggunakan TIK
Program yang dilakukan meliputi penyusunan peraturan pemanfaatan TIK yang menjamin terjadinya interaksi antara pemerintah dan masyarakat, pengembangan monitoring dan evaluasi partisipatif terhadap proses

pembangunan dengan memanfaatkan TIK, dan mewajibkan pejabat publik memiliki wadah interaksi online dengan publik.

- Peningkatan kerjasama multi pihak untuk pengembangan infrastruktur TIK
Program yang dilakukan meliputi fasilitasi dan koordinasi pengembangan infrastruktur, sinkronisasi peraturan dan kebijakan berakitan pengembangan infrastruktur TIK dan kebijakan insentif bagi pengembang infrastruktur TIK oleh swasta.

2. Mengembangkan organisasi dan tata kerja pemerintah yang partisipatif, efisien dan efektif dengan pemanfaatan TIK

Kebijakan 2.1

Pengembangan organisasi dan tata kerja yang mendukung pemerintahan yang partisipatif, efisien dan efektif

Strategi:

- Pengembangan perangkat organisasi dan tata kerja
Program yang dilakukan meliputi pembentukan SKPD yang melakukan pengelolaan dan pengembangan TIK, pembentukan itm teknis TIK pada setiap instansi pemerintah, dan penyediaan layanan publik yang terintegrasi.
- Pelibatan para pihak (stakeholders) dalam proses pembangunan melalui pemanfaatan TIK
Program yang dilakukan meliputi penyediaan layanan aspirasi masyarakat menggunakan TIK, fasilitasi pengembangan komunitas TIK dan pembentukan lembaga pendamping pemerintah dalam pengembangan TIK yang berbasis komunitas dan para pihak

3. Mengembangkan kapasitas SDM pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK

Kebijakan 3.1

Peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK

Strategi:

- Pengembangan kapasitas dan komitmen pengambil kebijakan dalam bidang TIK
Program yang dilakukan meliputi penyenggaraan workshop, dan penyediaan fasilitas interaksi online.
- Pengembangan institusi pendidikan TIK yang kuat dan berdaya saing global di Kaltim
Program yang dilakukan meliputi penyesuaian kurikulum pendidikan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengelola lembaga pendidikan, dan peningkatan fasilitas fisik TIK di institusi pendidikan
- Pengembangan komunitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK
Program yang dilakukan meliputi sosialisasi, pelatihan, pemberian penghargaan, dan pemberian dukungan terhadap kelompok masyarakat dan riset oleh akademisi

4. Meningkatkan pelayanan dasar berupa infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data bagi masyarakat secara merata dan proporsional

Kebijakan 4.1

Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi untuk melayani kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

Strategi:

- Pembangunan infrastruktur dan akses komunikasi dan informasi yang mencakup seluruh wilayah Kaltim
Program yang dilakukan meliputi pembuatan desain sistem komunikasi dan informasi, penyediaan paket insentif kepada pihak swasta, sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan akses

komunikasi dan informasi dengan proyek nasional, perencanaan layanan platform komunikasi berbasis multimedia, dan integrasi dengan proyek digital terrestrial communication.

- Pengembangan pengelolaan pusat data yang memiliki jaminan terhadap keamanan dan keberlangsungan data
Program yang dilakukan meliputi pembuatan pusat data terpadu dan pengembangan *disaster recovery system*

Kebijakan 4.2

Peningkatan kualitas pengelolaan sistem komunikasi dan informasi

Strategi:

- Integrasi dan optimalisasi infrastruktur komunikasi dan informasi ke seluruh wilayah Kaltim
Program yang dilakukan meliputi pengembangan wide area network (WAN), city dan province internet exchange
- Penyediaan akses komunikasi dan informasi bagi masyarakat yang murah dan berkualitas
Program yang dilakukan meliputi penyediaan perangkat komputer murah, peningkatan *knowledget based society*, *cyber city* dan *province*

5. Mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak yang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik lokal

Kebijakan 5.1

Pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi e-government dalam rangka efektifitas dan efisiensi proses pembangunan

Strategi:

- Identifikasi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan TIK
Program yang dilakukan meliputi identifikasi perangkat keras dan perangkat lunak di tingkat provinsi dan kabupaten-kota

- Pengembangan aplikasi layanan digital pemerintah yang mudah, memudahkan dan memiliki tingkat keamanan yang handal
Program yang dilakukan meliputi penyusunan kriteria yang harus diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak, pembuatan perangkat lunak dan pengembangan aplikasi utama e-governemnt
- Pengembangan integrasi aplikasi, interoperabilitas sistem dan application sharing
Program yang dilakukan meliputi pengembangan portal informasi pemerintahan dan pengembangan perangkat lunak multi platform
- Evaluasi perangkat keras dan perangkat lunak secara periodik sesuai dengan perkembangan TIK dan kebutuhan pemerintahan
Program yang dilakukan meliputi pengembangan alat evaluasi dan melakukan audit berkala
- Mendorong pengembangan perangkat lunak dengan memanfaatkan sumberdaya lokal
Program yang dilakukan meliputi pemberian dukungan kepada pembuat program lokal dan penyelenggaraan event-event untuk mendorong perangkat lunak lokal

6. Mengembangkan dan menyediakan layanan akses informasi untuk menciptakan masyarakat berdaya saing global

Kebijakan 6.1.

Penyediaan akses informasi/content bagi publik

Strategi:

- Pengembangan basis data dan basis pengetahuan yang terpadu dan partisipatif serta dapat diakses publik
Program yang dilakukan meliputi pembuatan jaringan pengumpulan data yang melibatkan instansi dan masyarakat
- Pengembangan dan koordinasi layanan informasi lokal yang independen

Program yang dilakukan meliputi peningkatan minat dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan informasi terpadu dan pelatihan Kebijakan 6.2.

Menjalin kerjasama lintas daerah, regional dan internasional dalam pengembangan layanan data dan informasi

Strategi:

- Pengembangan jaringan kerjasama lintas daerah, regional dan internasional

Program yang dilakukan meliputi pertukaran informasi dan koordinasi secara berkala

3. Pentahapan Pengembangan

BIDANG POKOK PENGEMBANGAN	2008	2009	2010	2011	2012
1. KEBIJAKAN					
1.1 Pengembangan regulasi dan kebijakan di bidang pengelolaan TIK					
<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan regulasi pengembangan e-government 					
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kriteria dan indikator keberhasilan pengelolaan TIK 					
<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Standar Prosedur Operasional untuk pengelolaan TIK 					
1.2 Pengembangan regulasi dan kebijakan di bidang pemanfaatan TIK					
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kebijakan pendidikan yang mendukung pemanfaatan TIK 					
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kebijakan yang menjamin adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat menggunakan TIK 					
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama multi pihak untuk pengembangan infrastruktur TIK 					
2. ORGANISASI dan TATA KERJA					
2.1 Pengembangan organisasi dan tata kerja yang mendukung pemerintahan yang partisipatif, efisien dan efektif					
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perangkat organisasi dan tata kerja 					
<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan para pihak (stakeholders) dalam proses pembangunan melalui pemanfaatan TIK 					
3. SUMBERDAYA MANUSIA					
3.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK					
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kapasitas dan komitmen pengambil kebijakan dalam bidang TIK 					
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan institusi pendidikan TIK yang kuat dan berdaya saing global di Kaltim 					
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan komunitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK 					

BIDANG POKOK PENGEMBANGAN	2008	2009	2010	2011	2012
4. INFRASTRUKTUR					
4.1 Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi untuk melayani kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat					
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan infrastruktur dan akses komunikasi dan informasi yang mencakup seluruh wilayah Kaltim 					
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pengelolaan pusat data yang memiliki jaminan terhadap keamanan dan keberlangsungan data 					
4.2 Peningkatan kualitas pengelolaan sistem komunikasi dan informasi					
<ul style="list-style-type: none"> Integrasi dan optimalisasi infrastruktur komunikasi dan informasi ke seluruh wilayah Kaltim 					
<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan akses komunikasi dan informasi bagi masyarakat yang murah dan berkualitas 					
5. PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK					
5.1 Pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi e-government dalam rangka efektifitas dan efisiensi proses pembangunan					
<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan TIK 					
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan aplikasi layanan digital pemerintah yang mudah, memudahkan dan memiliki tingkat keamanan yang handal 					
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan integrasi aplikasi, interoperabilitas sistem dan application sharing 					
<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi perangkat keras dan perangkat lunak secara periodik sesuai dengan perkembangan TIK dan kebutuhan pemerintahan 					
<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pengembangan perangkat lunak dengan memanfaatkan sumberdaya lokal 					
6. LAYANAN PUBLIK					
6.1 Penyediaan akses informasi/content bagi publik					

BIDANG POKOK PENGEMBANGAN	2008	2009	2010	2011	2012
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan basis data dan basis pengetahuan yang terpadu dan partisipatif serta dapat diakses publik 					
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan koordinasi layanan informasi lokal yang independen 					
6.2 Menjalinkan kerjasama lintas daerah, regional dan internasional dalam pengembangan layanan data dan informasi					
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jaringan kerjasama lintas daerah, regional dan internasional 					

4. Rencana Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

1. Kebijakan

1.1. Pengembangan regulasi dan kebijakan di bidang pengelolaan TIK

1.1.1. Pembuatan regulasi pengembangan e-government

1.1.1.1. Penyusunan peraturan administrasi pemerintah digital (digital office administration)

1.1.1.2. Penyusunan peraturan e-government, meliputi e-services, e-administration, e-legislation, e-budgeting, e-pembangunan, e-health, e-education, e-personnel

1.1.1.3. Penyusunan peraturan penggunaan perangkat lunak legal

1.1.1.4. Penyusunan peraturan kerangka penyiapan SDM bidang TIK

1.1.1.5. Penyusunan peraturan pelaksanaan kebijakan TIK nasional

1.1.1.6. Penyusunan peraturan penunjukan pusat riset TIK di Kaltim

1.1.2. Pengembangan kriteria dan indikator keberhasilan pengelolaan TIK

1.1.2.1. Penyusunan kriteria dan indikator keberhasilan administrasi pemerintahan digital (digital office administration)

1.1.2.2. Penyusunan kriteria dan indikator keberhasilan e-government, meliputi e-services, e-administration, e-legislation, e-budgeting, e-pembangunan, e-health, e-education, e-personnel

1.1.3. Pembuatan Standar Prosedur Operasional untuk pengelolaan TIK

1.1.3.1. Pengembangan prosedur perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sistem komunikasi dan informasi yang transparan dan akuntabel

1.1.3.2. Penyusunan SOP administrasi pemerintahan digital (digital office administration)

- 1.1.3.3. Penyusunan SOP e-government, meliputi e-services, e-administration, e-legislation, e-budgeting, e-pembangunan, e-health, e-education, e-personnel
 - 1.1.3.4. Penyusunan SOP penggunaan perangkat lunak legal
 - 1.1.3.5. Penyusunan SOP jabatan fungsional pranata komputer
 - 1.1.3.6. Penyusunan SOP keamanan data digital pemerintah
- 1.2. Pengembangan regulasi dan kebijakan di bidang pemanfaatan TIK
- 1.2.1. Pengembangan kebijakan pendidikan yang mendukung pemanfaatan TIK
 - 1.2.1.1. Penyusunan peraturan standar kompetensi dan sertifikasi tenaga TIK
 - 1.2.1.2. Penyusunan peraturan pengembangan pendidikan berbasis TIK
 - 1.2.2. Pengembangan kebijakan yang menjamin adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat menggunakan TIK
 - 1.2.2.1. Penyusunan peraturan pemanfaatan TIK yang menjamin terjadinya interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui penggunaan TIK
 - 1.2.2.2. Pengembangan monitoring dan evaluasi partisipatif terhadap proses pembangunan memanfaatkan TIK
 - 1.2.2.3. Penyusunan peraturan yang mewajibkan pejabat publik memiliki wadah interaksi online dengan publik
 - 1.2.3. Peningkatan kerjasama multipihak untuk pengembangan infrastruktur
 - 1.2.3.1. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan infrastruktur
 - 1.2.3.2. Sinkronisasi peraturan dan kebijakan yang berkaitan pengembangan infrastruktur TIK (nasional, provinsi, kabupaten-kota)

1.2.3.3. Kebijakan insentif bagi pengembang infrastruktur TIK oleh swasta

2. Organisasi dan Tata Kerja

2.1. Pengembangan Organisasi dan tata kerja

2.1.1. Pengembangan organisasi dan tata kerja yang mendukung pemerintahan yang partisipatif, efisien dan efektif

2.1.1.1. Pembentukan SKPD yang melakukan pengelolaan dan pengembangan TIK

2.1.1.2. Pembentukan tim teknis TIK (tenaga fungsional pranata komputer) pada setiap instansi pemerintah

2.1.1.3. Penyediaan layanan publik yang terintegrasi (East Kalimantan Single Window)

2.1.2. Pelibatan para pihak dalam proses pembangunan melalui pemanfaatan TIK

2.1.2.1. Penyediaan layanan aspirasi masyarakat menggunakan TIK (misalnya portal, SMS, dll)

2.1.2.2. Fasilitasi pengembangan komunitas-komunitas TIK

2.1.2.3. Pembentukan Lembaga pendamping pemerintah dalam pengembangan TIK yang berbasis komunitas dan para pihak

3. Sumberdaya Manusia

3.1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK

3.1.1. Pengembangan kapasitas dan komitmen pengambil kebijakan dalam bidang TIK

3.1.1.1. Penyelenggaraan workshop TIK bagi pengambil kebijakan

- 3.1.1.2. Penyediaan fasilitas wadah interaksi online antar pejabat publik dengan publik
- 3.1.2. Pengembangan institusi pendidikan TIK yang kuat dan berdaya saing global di Kaltim
 - 3.1.2.1. Penyesuaian kurikulum pendidikan dasar, menengah, tinggi menjadi berbasis TIK
 - 3.1.2.2. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengelola lembaga pendidikan yang berorientasi pada pemanfaatan TIK
 - 3.1.2.3. Peningkatan fasilitas fisik TIK di institusi pendidikan
- 3.1.3. Pengembangan komunitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK
 - 3.1.3.1. Sosialisasi pemanfaatan TIK
 - 3.1.3.2. Pelatihan TIK bagi publik
 - 3.1.3.3. Pemberian penghargaan bagi publik yang mendukung pengembangan TIK
 - 3.1.3.4. Pemberian dukungan bagi kelompok masyarakat yang memiliki potensi untuk mengembangkan TIK
 - 3.1.3.5. Dukungan terhadap riset oleh akademisi dalam pengembangan TIK

4. Infrastruktur

- 4.1. Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi untuk melayani kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
 - 4.1.1. Pembangunan infrastruktur dan akses komunikasi dan informasi yang mencakup seluruh wilayah Kaltim

- 4.1.1.1. Pembuatan desain Sistem Komunikasi dan Informasi yang aman, cepat, handal, dan murah secara kolaboratif melibatkan para pihak
- 4.1.1.2. Penyediaan paket insentif kepada pihak swasta yang membangun infrastruktur informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan fokus pada daerah yang belum terjangkau (blankspot)
- 4.1.1.3. Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan akses komunikasi dan informasi dengan palapa ring project
- 4.1.1.4. Perencanaan layanan platform komunikasi berbasis multimedia
- 4.1.1.5. Integrasi dengan proyek digital teresterial communication
- 4.1.2. Pengembangan pengelolaan pusat data yang memiliki jaminan keamanan dan keberlangsungan data
 - 4.1.2.1. Pembuatan pusat data terpadu yang memiliki jaminan keamanan dengan teknologi terkini
 - 4.1.2.2. Pengembangan disaster recovery system
- 4.2. Peningkatan kualitas pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi
 - 4.2.1. Integrasi dan optimalisasi infrastruktur komunikasi dan informasi ke seluruh wilayah Kaltim
 - 4.2.1.1. Pemantapan jaringan, berupa internet security system, network monitoring system, pembuatan ring fiber optic, mobile VPN, WiMax, upgrade bandwidth
 - 4.2.1.2. WAN (Wide Area Network) untuk pendidikan dan instansi pemerintah
 - 4.2.1.3. City Internet Exchange
 - 4.2.1.4. East Kalimantan Internet Exchange
 - 4.2.2. Penyediaan akses komunikasi dan informasi bagi masyarakat yang murah dan berkualitas

- 4.2.2.1. Penyediaan personal computer (PC) dan notebook murah bagi masyarakat
- 4.2.2.2. Peningkatan knowledge based society
- 4.2.2.3. Cyber city
- 4.2.2.4. Cyber province

5. Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

5.1. Pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi e-government dalam rangka efektifitas dan efisiensi proses pembangunan

5.1.1. Identifikasi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan TIK

5.1.1.1. Identifikasi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak di tingkat provinsi

5.1.1.2. Identifikasi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak di tingkat kabupaten/kota

5.1.2. Pengembangan aplikasi layanan digital pemerintah yang mudah, memudahkan dan memiliki tingkat keamanan yang handal

5.1.2.1. Penyusunan kriteria yang harus diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak

5.1.2.2. Pembuatan perangkat lunak berdasarkan prioritas dari hasil identifikasi

5.1.2.3. Pengembangan aplikasi utama e-government

5.1.3. Pengembangan integrasi aplikasi, interoperabilitas sistem dan application sharing

5.1.3.1. Pengembangan East Kalimantan Single Window (government information portal)

5.1.3.2. Pengembangan perangkat lunak yang multi platform

5.1.4. Evaluasi perangkat keras dan perangkat lunak secara periodik sesuai dengan perkembangan TIK dan kebutuhan pemerintahan

- 5.1.4.1. Pengembangan alat evaluasi perangkat keras dan perangkat lunak
- 5.1.4.2. Audit berkala perangkat keras dan perangkat lunak di lingkungan pemerintah
- 5.1.5. Mendorong pengembangan perangkat lunak dengan memanfaatkan Sumberdaya lokal
 - 5.1.5.1. Pemberian dukungan (insentif) terhadap pembuat program (software developer) lokal
 - 5.1.5.2. Penyelenggaraan event-event untuk mendorong pengembangan perangkat lunak lokal

6. Layanan Publik

6.1. Penyediaan informasi/content bagi publik

- 6.1.1. Pengembangan basis data dan basis pengetahuan terpadu dan partisipatif serta dapat diakses publik
 - 6.1.1.1. Pembuatan jaringan pengumpulan data yang melibatkan seluruh instansi secara terpadu
 - 6.1.1.2. Pembuatan jaringan pengumpulan data yang melibatkan masyarakat
- 6.1.2. Mendorong pertumbuhan pusat-pusat informasi lokal yang independen
 - 6.1.2.1. Peningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan informasi terpadu
 - 6.1.2.2. Pelatihan penyediaan informasi melalui berbagai media

6.2. Menjalin kerjasama lintas daerah, regional dan internasional dalam pengembangan layanan data dan informasi

- 6.2.1. Pengembangan jaringan kerjasama lintas daerah, regional dan internasional

6.2.1.1. Pertukaran informasi lintas daerah, regional dan internasional

6.2.1.2. Koordinasi secara berkala antar daerah, regional dan internasional

b. Strategi Pelaksanaan

Untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan dan strategi pengelolaan TIK di Kaltim diperlukan penjabaran lebih lanjut yang bersifat operasional di tingkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang disertai dengan rincian anggaran pelaksanaan dan sumber anggaran yang jelas.

Untuk menjaga integrasi serta keterkaitan antara program di setiap SKPD, diperlukan satu unit kerja khusus setingkat SKPD yang melakukan fungsi koordinasi dan fasilitasi antar SKPD, sehingga didapatkan program kerja yang integratif dan berorientasi pada pencapaian visi dan misi pembangunan TIK Kaltim.

c. Indikator Keberhasilan

BIDANG POKOK PENGEMBANGAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
1. KEBIJAKAN	
1.1 Pengembangan regulasi dan kebijakan di bidang pengelolaan TIK	<ul style="list-style-type: none">• Adanya dokumen peraturan administrasi pemerintah digital, e-government, penggunaan perangkat lunak• Adanya dokumen kriteria dan indikator keberhasilan pengelolaan TIK• Adanya dokumen Standar Prosedur Operasional untuk pengelolaan TIK
1.2 Pengembangan regulasi dan kebijakan di bidang pemanfaatan TIK	<ul style="list-style-type: none">• Adanya dokumen peraturan standar kompetensi dan sertifikasi tenaga TIK• Adanya dokumen peraturan yang menjamin adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat menggunakan TIK• Adanya dokumen kerjasama multi pihak untuk pengembangan infrastruktur TIK
2. ORGANISASI dan TATA KERJA	
2.1 Pengembangan organisasi dan tata kerja yang mendukung pemerintahan yang partisipatif, efisien dan efektif	<ul style="list-style-type: none">• Dibentuknya SKPD pengelolaan TIK dan tim teknis TIK pada setiap instansi

BIDANG POKOK PENGEMBANGAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya layanan aspirasi masyarakat yang menggunakan TIK
	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya lembaga pendamping pemerintah dan komunitas TIK
3. SUMBERDAYA MANUSIA	
3.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya 2 kali workshop setiap tahun yang berhasil guna
	<ul style="list-style-type: none"> Pejabat publik memiliki wadah interaksi online yang selalu ter-update
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kurikulum pendidikan yang berbasis TIK dan terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengelola lembaga pendidikan yang berorientasi pada pemanfaatan TIK
	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya 4 kali pelatihan setiap tahun dan adanya pemberian penghargaan dan dukungan terhadap komunitas TIK
4. INFRASTRUKTUR	
4.1 Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi untuk melayani kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Akses komunikasi dan informasi yang mencakup seluruh wilayah Kaltim terwujud pada tahun 2010
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pusat data terpadu dan disaster recovery system
4.2 Peningkatan kualitas pengelolaan sistem komunikasi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya WAN, City Internet Exchange dan East Kalimantan Internet Exchange pada tahun 2010
	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya PC dan laptop murah serta meningkatnya knowledge based society
	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya cyber city dan cyber province pada tahun 2011
5. PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK	
5.1 Pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi e-government dalam rangka efektifitas dan efisiensi proses pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya dokumen hasil identifikasi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan TIK
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kriteria pengembangan perangkat lunak dan adanya pembuatan perangkat lunak dan aplikasi utama e-government
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya government information portal dan perangkat lunak multi platform

BIDANG POKOK PENGEMBANGAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya evaluasi tahunan dan audit berkala perangkat keras dan perangkat lunak
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pemberia dukungan terhadap pembuat program dan dilakukannya event-event tahunan
6. LAYANAN PUBLIK	
6.1 Penyediaan akses informasi/content bagi publik	<ul style="list-style-type: none"> Adanya jaringan pengumpulan data yang melibatkan instansi dan masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pelatihan dan meningkatnya minat dan partisipasi dalam penggunaan layanan informasi terpadu
6.2 Menjalin kerjasama lintas daerah, regional dan internasional dalam pengembangan layanan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pertukaran informasi dan koordinasi berkala lintas daerah, regional dan internasional sekurangnya satu kali dalam setahun

d. Monitoring dan Evaluasi

1) Pengertian

a) Monitoring

Monitoring adalah langkah pengamatan terhadap berbagai kegiatan untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan, prosedur dan keluarannya (out-put) tercapai sesuai dengan perencanaannya. Hasil sebuah monitoring adalah tindakan-tindakan korektif terhadap penyimpangan dari perencanaan. Oleh karena itu monitoring berfungsi sebagai alat pengelolaan internal untuk meluruskan arah kemajuan pelaksanaan proyek yang termasuk dalam tingkat perencanaan dan pelaksanaan.

b) Evaluasi

Evaluasi pada pengertian umum adalah langkah-langkah untuk menilai sejauhmana hasil proyek ini terhadap dampak yang sudah direncanakan. Namun sebenarnya evaluasi dapat dilakukan berbagai tahap, tetapi pada umumnya untuk memudahkan proses dibagi ke dalam 4 (empat) tingkatan: evaluasi pra-proyek, evaluasi pada saat berjalan, evaluasi sumatif (akhir) dan evaluasi pasca proyek.

2) Tujuan

Program monitoring dan evaluasi secara umum bertujuan untuk menjamin keberhasilan dari Pemanfaatan TIK di Kaltim terhadap masyarakat dalam pemanfaatan TIK. Secara khusus tujuannya untuk :

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dilapangan dan permasalahan pelaksanaan dilapangan, serta upaya untuk pemecahan/ penyelesaian masalah secara lintas pelaku.
2. Melihat kinerja pengelolaan proyek dari seluruh aspek selama periode tertentu sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan proyek pada periode berikutnya.
3. Melibatkan para pelaku (stakeholder) lebih berperan aktif dalam pengelolaan proyek secara langsung maupun tidak langsung.

3) Prinsip-prinsip

Keberhasilan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu dilandasi oleh kejujuran, motivasi dan kesungguhan yang kuat dari para pelaku. Selain itu, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Grand Design TIK adalah:

1. Obyektif dan profesional

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan Grand Design.

2. Transparan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara terbuka dan dilaporkan secara luas melalui berbagai media yang ada agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah tentang informasi dan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi.

3. Partisipatif

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan secara aktif dan interaktif para pengguna TIK, termasuk masyarakat itu sendiri.

4. Akuntabel

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dapat dipertanggung-jawabkan secara internal maupun eksternal.

5. Tepat waktu

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

6. Berkesinambungan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan.

7. Berbasis indikator kinerja

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak.

4) Ruang Lingkup

Program monitoring dan evaluasi pemanfaatan TIK di Kaltim mencakup kegiatan:

1. Penyusunan indikator kinerja pemanfaatan TIK berikut tolok ukur keberhasilan/ pelaksanaan.
2. Model/bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lapangan.
3. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi yang bertugas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi proyek di lapangan.
4. Penyusunan jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lapangan.

5. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan.

Pada hakekatnya evaluasi diyakini sangat berperan dalam upaya meningkatkan kualitas operasional suatu program dan berkontribusi penting dalam memandu pembuat kebijakan di seluruh strata organisasi. Dengan menyusun, mendesain evaluasi yang baik dan menganalisis hasilnya dengan tajam, kegiatan evaluasi dapat memberi gambaran tentang bagaimana kualitas operasional program, layanan, kekuatan dan kelemahan yang ada, efektivitas biaya dan arah produktif potensial masa depan. Dengan menyediakan informasi yang relevan untuk pembuat kebijakan, evaluasi dapat membantu menata seperangkat prioritas, mengarahkan alokasi sumber dana, memfasilitasi modifikasi dan penajaman struktur program dan aktivitas serta memberi sinyal akan kebijakan penataan ulang personil dan sumber daya yang dimiliki. Disamping itu, evaluasi dapat dimanfaatkan untuk menilai dan meningkatkan kualitas serta kebijakan program TIK.

5) Mekanisme Implementasi Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dilakukan secara periodik dan terpadu oleh SKPD yang membidangi Informasi dan Komunikasi, yang melibatkan instansi perencanaan pembangunan, keuangan, pengawas daerah serta SKPD yang melaksanakan program TIK.

Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan TIK di lingkup Pemprov Kaltim dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memperoleh masukan dan tindakan perbaikan serta menghindari terjadinya tumpang tindih program antar SKPD.

Hasil monitoring dan evaluasi secara periodik digunakan sebagai dasar untuk penyusunan perencanaan program tahun berikutnya.

5. Penutup

Setelah bekerja selama satu tahun, akhirnya Grand Desain Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar acuan bagi pelaksanaan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemprov Kaltim dapat diselesaikan. Kami sadar sepenuhnya bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan masih memerlukan banyak masukan dari para pihak terkait. Namun apa yang telah dilakukan merupakan suatu langkah awal yang merupakan satu tonggak sejarah bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di Kaltim.

Dengan mengucapkan syukur ke rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dokumen ini kami serahkan kepada Pemprov Kaltim untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dan semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan Provinsi Kaltim.

Samarinda, 6 Desember 2007 – 01.54 wita

Tim Grand Design TIK Provinsi Kaltim